BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan ujung tombak untuk membangun negeri, seperti yang diutarakan oleh A.H. Nasution, bahwa "Membangun negeri ini, harus dimulai dari desa!", karena kemakmuran negeri terdapat pada kemakmuran desanya. Menurut Sutoro (2014) pembangunan harus berangkat dari bawah (bottom up) untuk itu Desa harus menjadi titik atau fondasi awal berangkatnya pembangunan.

Indonesia merupakan kumpulan dari ribuan desa. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional Alamsyah (2011). Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana Indonesia terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 Kelurahan, dan 74.957 Desa.

Menurut data Indeks Pembangunan Desa yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 dari sekian banyaknya desa di Indonesia masih banyak desa yang masuk dalam kategori Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang rendah khususnya Jawa Timur. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Jawa Timur berada pada tingkat ke 6 pada Wilayah Jawa dan Bali.

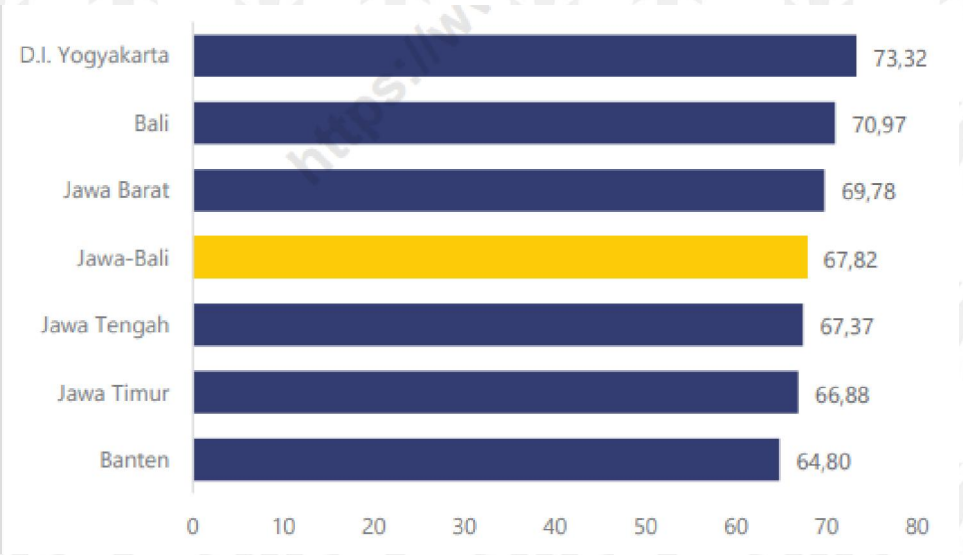

Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Desa Wilayah Jawa dan Bali.

Menurut Perpres No 131 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 – 2019 bahwa suatu daerah bisa ditetapkan sebagai desa tertinggal berdasarkan :

1. Perekonomian Masyarakat
2. Sumber Daya Manusia
3. Sarana dan Prasarana
4. Kemampuan Keuangan Daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik Daerah

Karakteristik tersebut dibuat acuan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Percepatan pembangunan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang difungsikan agar desa ditempatkan sebagai prioritas pembangunan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk percepatan pembangunan desa. Percepatan pembangunan desa diarahkan untuk :

1. Mengurangi kemiskinan ekonomi di pedesaan
2. Memenuhi standar pelayanan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

4. Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik
5. Mewujudkan desa yang berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan daerah
6. Membangun keterkaitan desa-kota

Sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan desa, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk anggaran Dana Desa yang dipergunakan untuk pembangunan desa guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Mirah *et al,* (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan pertanian yang diharapkan agar para petani dapat mempercepat proses penjualan hasil pertanian.

Pemanfaatan dana desa yang baik mampu memberikan dampak yang baik bagi desa, seperti halnya pemanfaatan dana desa di Desa Hendrosari. Pemanfaatan dana desa tersebut dimanfaatkan untuk menunjang program-program yang sudah dirumuskan di awal yaitu program edu wisata lontar sewu, Pemerintah Desa Hendrosari mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 300.000.000,00 untuk penunjang program tersebut. Program tersebut mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat.

NO	KETERANGAN	SEBELUM	SESUDAH
1.	Menyerap Tenaga Kerja Baru	8 Orang (warga asli Desa Hendrosari)	103 Orang (warga asli Desa Hendrosari)
2.	Meningkatkan pendapatan bagi 119 petani siwalan	100 ribu/hari	300 ribu/hari
3.	keluarga miskin Desa Hendrosari	114 keluarga	88 keluarga

Tabel 1. 1 Menurut (Yuswantoro, sindonews, 2020) Fakta Maju dan Kemandiriannya Perekonomian Desa Hendrosari

Keberhasilan pengelolaan dana desa guna untuk pembangunan desa ditentukan oleh pemimpin sebagai pengelola dan penggerak roda kepemerintahan yang merumuskan kebijakan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Dengo (2019) peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap berkembangnya suatu pembangunan desa. Menurut Nadhifah (2018) dalam pembangunan desa, pemimpin dituntut untuk mampu menggerakkan masyarakat dan memotivasi untuk bersama-sama membangun desa. Pemimpin harus mempunyai kapabilitas atau kemampuan, pengalaman yang lebih luas dari bawahannya, agar bisa mendorong dan mengajak bawahannya untuk menjalankan sesuatu guna untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Lamangida et al., (2017) untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, maka sangat penting seorang pemimpin untuk bisa meningkatkan pengetahuan, kepribadian dan keterampilan melalui pembinaan watak (character building). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dalam organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus menggunakan pendekatan yang berbeda dengan menyesuaikan pada situasi di sekitar pemimpin. Situasi yang berbeda menuntut jenis kepemimpinan yang berbeda. Untuk itu, menurut Northouse (2013:95) pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gaya pemimpin dengan tuntutan dari situasi yang berbeda.

Menurut Wirjana dan Supardo (2006:48) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kematangan para anggotanya. Kematangan diakses dalam hubungan dengan tugas spesifik dan mempunyai dua bagian sebagai berikut.

1. Kematangan psikologis : kepercayaan diri, kemampuan dan kesiapan menerima tanggung jawab.
2. Kematangan pekerjaan (job maturity) : keterampilan dan pengetahuan teknis yang relevan.
3. Bila kematangan para anggota bertambah, kepemimpinan harus lebih berorientasikan pada hubungan dan bukan berorientasikan tugas.

Ada beberapa tingkat kematangan anggota dari yang amat matang ke yang paling tingkat matang, untuk itu kepemimpinan dapat terdiri dari:

1. mendelegasikan kepada anggota,
2. berpartisipasi dengan anggota,
3. menjual/memberikan ide-ide kepada anggota, dan
4. memberitahukan anggota apa yang harus mereka kerjakan.

Dalam kepemimpinannya, Kepala Desa Hendrosari selalu mengarahkan bawahannya, karena tidak semua bawahannya mempunyai kematangan yang sama. Tidak hanya mengarahkan, Kepemimpinan Kepala Desa Hendrosari juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan program-program Desa Hendrosari, sehingga dapat terlaksana secara baik. seperti apa yang dikemukakan Thoha (2019:63) bahwa kepemimpinan situasional didasarkan atas hubungan saling mempengaruhi antara lain seperti halnya berikut :

1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan,
2. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan, dan
3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu.

Peran Kepemimpinan kepala Desa Hendrosari dalam melaksanakan pembangunan desa bisa dikatakan berhasil karena melibatkan semua *stakeholder* yang terkait. Berawal dari musyawarah desa yang dilakukan pada 2013 yang memutuskan Desa Hendrosari menjadi desa wisata dengan pemanfaatan potensi desa yaitu pohon siwalan. Tidak hanya memanfaatkan dana desa, Kepala desa tersebut juga menggandeng sekelompok mahasiswa Unesa untuk mendapatkan pendanaan melalui program PHP2D dari Kemenristekdikti tahun 2018. Seperti apa yang dikemukakan oleh Mohammad dan Farjana (2018) bahwa pembangunan dapat efektif dengan partisipatif semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aisia (2017) di Desa Sri Pendowo dan Tanjung Jaya memperoleh hasil bahwa Gaya Kepemimpinan saling keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dan berpengaruh positif dalam keberhasilan pembangunan desa. Namun, pada penelitian yang dilakukan Susanto (2019) di desa Teraju

memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh dalam pembangunan desa. Untuk itu masyarakat harus dilibatkan dalam melaksanakan Pembangunan Desa. Pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa pada tahapan perencanaan pembangunan diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: "masyarakat (stakeholders) harus terlibat dalam menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan".

Kemajuan desa tersebut juga atas keikutsertaan masyarakat dalam pembangunannya, mulai dari musyawarah desa sampai pemanfaatan hasilnya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Mohammad dan Farjana (2018) bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan bisa tercipta apabila masyarakat dilibatkan dalam :

1. pelaksanaan kegiatan
2. pengambilan keputusan
3. pemantauan kegiatan pembangunan dan evaluasi
4. partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

hal tersebut sejalan dengan pendapat Nasrullah (2013) yang mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pada prosesnya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, pemimpin mempunyai peran penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut pemimpin bisa melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat melalui program-program tahunan. Seperti Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu desa yang berhasil menjadi desa maju dan mandiri di kecamatan Menganti melalui program Edu Wisata Lontar Sewu.

Sebelum majunya perekonomian Desa Hendrosari, menurut Wahyuningsih dan Pradana (2021) Desa Hendrosari dahulu dikenal oleh masyarakat dengan stigma buruk yaitu desa yang memabukkan, dikarenakan desa tersebut menjadi salah satu produsen tradisional tuak, yang dibuat dari fermentasi buah siwalan. Atas usaha Kepala Desa bersama masyarakat stigma tersebut diubah menjadi stigma yang lebih baik, yaitu desa yang mempunyai ekonomi yang maju dan mandiri, untuk itu dalam pembangunan desa masyarakat harus terlibat didalamnya, karena kondisi hubungan yang baik antara pemangku kebijakan dan masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi pembangunan desa. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Hendrosari?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Hendrosari ?
3. Apakah gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dapat berpengaruh bersama-sama terhadap pembangunan di Desa Hendrosari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menilai apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di Desa Hendrosari.
2. Untuk menilai apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di Desa Hendrosari.
3. Untuk menilai apakah Gaya Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan di Desa Hendrosari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa dengan menerapkan gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah khasanah keilmuan sekaligus berpartisipasi aktif dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa tentang makna gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau referensi bagi kalangan akademik dalam menambah wawasan pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.